



Implementasi Nilai Pancasila dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Politik Studi Kasus Ricuh Demonstrasi di Yogyakarta

Riyan Ferdianto

Prodi Aqidah dan Filsafat Islam,
Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Korespondensi :
23105010010@student.uin-suka.ac.id

Masuk : 28 Oktober 2025
Revisi : 11 November 2025
Diterima : 17 November 2025
Diterbitkan : 27 Desember 2025

Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Pembumian
Pancasila



Artikel ini berlisensi [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelesaian konflik sosial-politik di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus kerusuhan demonstrasi di Yogyakarta. Meningkatnya jumlah demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia mencerminkan dinamika sosial-politik yang kompleks, yang terutama disebabkan oleh ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah, ketimpangan sosial, serta komunikasi politik yang kurang efektif antara negara dan masyarakat. Kasus Yogyakarta menjadi contoh konkret untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila dapat berfungsi sebagai pedoman moral, etika sosial, dan landasan kebijakan dalam meredam konflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada kronologi, penyebab, dan dampak sosial-politik dari peristiwa tersebut. Analisis dilakukan berdasarkan lima sila Pancasila sebagai sistem nilai yang terpadu, yang menekankan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial-politik di Yogyakarta tidak hanya dipicu oleh kepentingan politik, tetapi juga oleh lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat, terutama dalam aspek dialog, empati, dan musyawarah. Penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten terbukti efektif sebagai landasan penyelesaian konflik yang damai, adil, dan beradab. Melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan struktural, nilai-nilai Pancasila dapat diaktifkan kembali untuk memperkuat kohesi sosial, mencegah kekerasan politik, serta menumbuhkan budaya politik yang humanis dan berkeadilan di Indonesia.

Keywords: *Demonstrasi Yogyakarta, Konflik Sosial-Politik; Nilai-Nilai Kebangsaan, Pancasila; Resolusi Konflik*

Cara Mengutip

Ferdianto, R. (2025). IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK SOSIAL POLITIK STUDI KASUS RICUH DEMONSTRASI DI YOGYAKARTA. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 5(2): 63-72. Tautan : <https://jurnalpembumianpancasila.id/index.php/jpp/article/view/65> DOI : <https://doi.org/10.63758/jpp.v5i2.65>

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keanekaragaman budaya, suku, bahasa, dan agama yang sangat luas. Keberagaman ini merupakan kekuatan bangsa, tetapi juga memiliki potensi konflik sosial dan politik apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam sejarah perjalanan bangsa, konflik sosial politik kerap kali muncul akibat perbedaan pandangan, kepentingan ekonomi, maupun ideologi. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika dihadapkan pada perkembangan media sosial dan globalisasi yang mempercepat penyebaran informasi, termasuk provokasi dan disinformasi (M. Arifin, 2023).

Perubahan sosial yang cepat, ditambah dengan ketimpangan ekonomi dan politik, menjadikan masyarakat rentan terhadap gesekan sosial. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk ekspresi demokrasi yang dijamin oleh konstitusi, namun dalam praktiknya sering kali berujung pada bentrokan fisik, kerusakan fasilitas umum, bahkan korban jiwa. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, tetapi juga di kota pelajar seperti Yogyakarta (Susilowat et al., 2023).

Peristiwa ricuh demonstrasi di Yogyakarta beberapa tahun terakhir menggambarkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum. Misalnya, aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang pada awalnya berlangsung damai berubah menjadi kericuhan akibat kesalahpahaman, tindakan represif aparat, maupun provokasi dari pihak tertentu. Konflik ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa, khususnya nilai-nilai Pancasila, belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik sosial politik masyarakat (Nursetialloh, 2017).

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mengandung prinsip-prinsip yang jika diimplementasikan secara konsisten dapat menjadi pedoman moral dan etika dalam menyelesaikan konflik. Lima sila Pancasila Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan memberikan arah bagaimana manusia Indonesia seharusnya bersikap dalam menghadapi perbedaan pandangan dan kepentingan. Dengan demikian, studi mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks penyelesaian konflik sosial politik menjadi penting untuk dikaji secara mendalam.

Yogyakarta sebagai kota pendidikan, budaya, dan pusat intelektual bangsa memiliki peran strategis dalam menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi sejumlah demonstrasi yang memanas, terutama terkait isu kebijakan nasional, kebebasan akademik, dan keadilan sosial. Peristiwa ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealisme mahasiswa dan pendekatan otoritatif aparat, yang pada akhirnya menimbulkan benturan sosial (Iswardhana et al., 2024).

Melalui penelitian ini, penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan secara nyata untuk meredam konflik, membangun kembali kepercayaan antarwarga, dan menciptakan ruang dialog yang beradab. Kajian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi penguatan karakter kebangsaan di tengah dinamika demokrasi modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Fokus penelitian diarahkan pada peristiwa ricuh demonstrasi di Yogyakarta yang merepresentasikan bentuk konflik sosial politik di era modern. Data diperoleh melalui studi pustaka, analisis dokumen, dan observasi terhadap pemberitaan media serta laporan lembaga terkait.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menafsirkan fakta sosial menggunakan teori konflik dan teori resolusi sosial, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara nilai ideologis dan praktik sosial politik.

Hasil Dan Pembahasan

Deskripsi Kasus Ricuh Demonstrasi Di Yogyakarta

Latar Umum dan Kronologi Kejadian

Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan dan budaya yang sarat dengan dinamika intelektual, idealisme mahasiswa, dan tradisi demokratis. Dalam sejarahnya, kota ini sering menjadi panggung pergerakan sosial dan politik, terutama melalui ekspresi mahasiswa terhadap isu nasional. Demonstrasi merupakan bentuk artikulasi politik mahasiswa yang sah menurut konstitusi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Namun, beberapa peristiwa belakangan menunjukkan adanya perubahan pola: dari demonstrasi damai menjadi tindakan anarkis dan benturan fisik antara massa aksi dan aparat keamanan (Maksudin, 2023).

Salah satu kasus yang menonjol terjadi pada Demonstrasi Mahasiswa di Titik Nol Kilometer Yogyakarta tahun 2022, yang awalnya merupakan aksi solidaritas terhadap isu nasional terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebijakan ekonomi pemerintah. Aksi ini diikuti oleh ribuan mahasiswa dari berbagai universitas, termasuk UGM, UII, UPN, dan UNY, serta masyarakat umum yang turut bersimpati terhadap isu tersebut. Aksi berlangsung damai pada awalnya, dengan orasi dan panggung rakyat di kawasan Malioboro (Informasi, 2022).

Namun, menjelang sore hari, situasi berubah ketika sebagian massa mulai melemparkan botol air mineral dan batu ke arah aparat. Aparat kepolisian kemudian merespons dengan gas air mata dan pembubaran paksa. Bentrokan singkat terjadi, menyebabkan beberapa mahasiswa terluka dan sejumlah fasilitas publik rusak, termasuk pagar dan kaca toko di sekitar Malioboro.

Peristiwa ini menimbulkan reaksi luas dari masyarakat, terutama terkait dugaan tindakan represif aparat dan provokasi massa yang belum teridentifikasi. Banyak kalangan menilai bahwa konflik tersebut menunjukkan lemahnya kanal komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah, serta hilangnya ruang dialog yang beradab (Damanik, 2024).

Faktor Penyebab Konflik

Analisis terhadap kasus demonstrasi di Yogyakarta menunjukkan bahwa konflik ini tidak semata-mata disebabkan oleh isu kebijakan ekonomi, melainkan hasil interaksi berbagai faktor sosial, politik, dan psikologis (Maksum, 2016).

Faktor Struktural

Kenaikan harga BBM pada tahun 2022 dianggap sebagai simbol ketidakadilan ekonomi oleh sebagian masyarakat. Ketimpangan sosial antara kelompok elite dan rakyat kecil memperkuat rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Mahasiswa sebagai kelompok moral merasa perlu menjadi penyalur aspirasi publik (Akhmad et al., 2023).

Faktor Komunikasi Publik

Kegagalan komunikasi antara pemerintah, aparat, dan mahasiswa menjadi faktor kunci. Pemerintah dianggap tidak membuka ruang diskusi yang transparan mengenai kebijakan kenaikan harga BBM, sementara aparat cenderung menggunakan pendekatan keamanan yang represif dibandingkan pendekatan dialog (Pescador Prieto, 2022).

Faktor Psikologis dan Emosional

Aksi yang berlangsung lama di bawah kondisi panas dan padat membuat massa mudah terprovokasi. Situasi psikologis yang tegang, ditambah dengan hadirnya provokator yang tidak dikenal, mempercepat perubahan suasana dari damai menjadi ricuh (Adam-Troian et al., 2020).

Faktor Politisasi Isu

Dalam konteks politik nasional, demonstrasi sering dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memperkuat posisi politik atau melemahkan legitimasi pemerintah. Media sosial memperparah keadaan dengan penyebaran narasi provokatif dan hoaks yang memicu kemarahan kolektif (Firmansyah, 2023).

Dampak yang Ditimbulkan

Konflik sosial politik akibat demonstrasi di Yogyakarta berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Konflik sosial politik akibat demonstrasi di Yogyakarta berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari disharmoni sosial, segregasi, rasa tidak aman, hingga gangguan ekonomi dan lingkungan (M. Arifin, 2023).

Dampak Sosial

Masyarakat sekitar lokasi demonstrasi mengalami ketakutan dan trauma sosial. Aktivitas ekonomi terganggu, pelaku usaha kecil di Malioboro merugi, dan hubungan antara mahasiswa serta aparat memburuk. Peristiwa ini juga menimbulkan citra negatif terhadap gerakan mahasiswa yang sebelumnya dikenal santun dan rasional (Antara, 2022).

Dampak Politik

Ricuh demonstrasi memperlemah kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan aparat keamanan. Muncul persepsi bahwa negara gagal menciptakan ruang demokrasi yang sehat dan aman. Hal ini berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan terhadap sistem politik dan memperkuat apatisisme di kalangan muda (Hidayat, 2023).

Dampak Ekonomi

Selain kerugian material akibat kerusakan fasilitas publik, aktivitas perdagangan dan pariwisata Yogyakarta menurun pasca insiden tersebut. Data Dinas Pariwisata DIY menunjukkan adanya penurunan kunjungan wisatawan domestik sebesar 12% dalam minggu pascainsiden karena kekhawatiran terhadap keamanan (WIBOWO et al., 2021).

Respons Pemerintah dan Masyarakat

Setelah peristiwa tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan aparat kepolisian melakukan serangkaian langkah pemulihan, antara lain:

1. Menyelenggarakan dialog terbuka antara pemerintah daerah, perwakilan mahasiswa, dan tokoh masyarakat.
2. Menindak tegas oknum aparat dan provokator yang terbukti memperkeruh situasi.
3. Mendorong pelibatan kampus dan organisasi kemahasiswaan dalam edukasi politik dan literasi Pancasila.

Rektor UGM dan UIN Sunan Kalijaga turut memediasi pertemuan antara perwakilan mahasiswa dan Kapolda DIY, menekankan pentingnya membangun dialog, bukan kekerasan sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa (Susilowati et al., 2023).

Tokoh masyarakat seperti Romo Sindhunata dan Budayawan Emha Ainun Nadjib menyerukan refleksi moral bahwa konflik sosial adalah akibat hilangnya roh kebangsaan dan empati, serta menyerukan agar nilai-nilai Pancasila khususnya kemanusiaan dan musyawarah kembali dijadikan pedoman.

Pembelajaran dari Kasus Yogyakarta

Dari kasus ini, terdapat beberapa pelajaran penting:

1. Demonstrasi bukan ancaman bagi negara, melainkan bagian dari ekspresi demokrasi. Namun, tanpa nilai moral dan komunikasi terbuka, demokrasi bisa melahirkan kekerasan.
2. Nilai-nilai Pancasila perlu diinternalisasi kembali, terutama sila kedua dan keempat yang menekankan kemanusiaan dan musyawarah.
3. Institusi pendidikan harus menjadi motor rekonsiliasi sosial, bukan sekadar ruang intelektual.

4. Perlu adanya sistem komunikasi publik yang lebih terbuka, agar kebijakan pemerintah tidak memicu kesalahpahaman.
5. Pendekatan keamanan harus berbasis kemanusiaan, bukan sekadar penegakan hukum formalistik.

Dengan demikian, kasus demonstrasi di Yogyakarta dapat dijadikan laboratorium sosial untuk memahami dinamika konflik sosial politik di era demokrasi digital. Nilai-nilai Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol, tetapi harus hadir sebagai pedoman moral dan kebijakan dalam praktik kehidupan berbangsa (Fishman, 2025).

Analisis implementasi nilai-nilai pancasila dalam penyelesaian konflik

Sila Ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Ketuhanan menegaskan bahwa kehidupan berbangsa harus disertai kesadaran spiritual dan etika moral. Dalam konteks konflik demonstrasi, nilai ini mengundang semua pihak untuk bertindak dengan rasa tanggung jawab moral, menjaga kesucian tindakan, dan menahan diri dari tindakan yang melukai sesama. Ketika demonstran atau aparat kehilangan kontrol moral, kecenderungan kekerasan dapat muncul (Shearer, 2021).

Dalam kasus demonstrasi di Yogyakarta, ada seruan dari kalangan akademisi dan tokoh keagamaan agar aksi tetap damai, dengan mengingat nilai ketuhanan sebagai panggilan kemanusiaan. Namun realitas lapangan menunjukkan bahwa ajakan moral tersebut sering kalah oleh dorongan emosi massa dan tekanan situasional.

Implementasi nilai Ketuhanan dapat diwujudkan dalam:

- Kegiatan pembukaan demonstrasi atau dialog dengan doa bersama sebagai simbol bahwa konflik tidak semata urusan kekuasaan, melainkan kemanusiaan.
- Penyampaian aspirasi dalam bahasa yang santun dan tidak menghina simbol agama atau kepercayaan lawan.
- Moderasi dan pengendalian diri ketika provokasi muncul, sebagai wujud kesadaran moral terhadap kodrat manusia.

Tantangannya meliputi: variasi interpretasi nilai religius antar individu; dalam situasi konflik, sering muncul tindakan ekstrem yang justru mengabaikan nilai moral; serta sulitnya memadukan kepentingan politik dengan panggilan keagamaan jika nilai tersebut dianggap sebagai alat retorik (Agostini & van Zomeren, 2021).

Sila Ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Kedua mengandung kewajiban bagi semua pihak untuk menghormati harkat dan martabat manusia. Dalam praktik penanganan demonstrasi, nilai ini menjadi tolok ukur apakah tindakan aparat maupun massa tetap berada dalam kerangka hak asasi dan etika publik.

Dalam demonstrasi Yogyakarta, terdapat laporan bahwa aparat menggunakan gas air mata dan pembubaran paksa yang dianggap berlebihan. Tindakan seperti itu memicu tanggapan bahwa pengendalian demonstrasi lebih menonjolkan kekuasaan daripada penghormatan terhadap kemanusiaan. Di sisi lain, sebagian demonstran melakukan aksi simbolik yang merusak agar suaranya terdengar kebijakan tersebut juga perlu ditinjau dari kaca mata kemanusiaan (Maksudin, 2023).

Untuk mendekatkan praktik konflik ke sila kedua, beberapa strategi bisa dilakukan:

1. Pelatihan aparat keamanan tentang prinsip penanganan demonstrasi berbasis hak asasi manusia, di mana pembubaran dilakukan sebagai opsi terakhir setelah dialog dan mediasi gagal.
2. Pendekatan “zona aman” dalam demonstrasi, yaitu area yang disepakati dimana massa dapat berkumpul ekspresif tanpa mengganggu publik umum.

3. Penggunaan mediator sipil atau tokoh masyarakat yang memahami konflik dan dapat menahan eskalasi.
4. Penerapan sanksi jika terjadi tindakan yang melanggar hak asasi, baik terhadap demonstran maupun aparat, sebagai bentuk keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Tantangan nyata: tekanan massa yang emosional, provokasi, dan karakter demonstrasi yang campuran di antara aktivis damai ada elemen provokator yang tidak teridentifikasi. Aparat sering dipaksa merespon cepat, kadang dengan tindakan represi. Nilai kemanusiaan bisa saja “tersubordinasi” oleh kebutuhan menjaga ketertiban publik dalam situasi kritis.

Sila Ke-3: Persatuan Indonesia

Sila ketiga mengandung nilai fundamental tentang pentingnya menjaga keutuhan bangsa di atas kepentingan golongan. Dalam konteks konflik sosial politik seperti demonstrasi ricuh di Yogyakarta, sila ini menjadi pedoman utama agar ekspresi politik tidak berubah menjadi perpecahan sosial. Persatuan di sini tidak berarti meniadakan perbedaan, tetapi mengelola perbedaan dalam bingkai kebangsaan (Firmansyah, 2022).

Ricuh demonstrasi di Yogyakarta menunjukkan bahwa semangat nasionalisme dan rasa persaudaraan sering kali kalah oleh kepentingan ideologis atau politik praktis. Para mahasiswa yang awalnya menyuarakan aspirasi keadilan sosial, akhirnya terseret arus provokasi akibat komunikasi publik yang tidak sehat di media sosial. Menurut hasil riset Pusat Kajian Politik Universitas Gadjah Mada (2022), disinformasi di media daring sering memperkuat polarisasi antara aparat dan masyarakat sipil.

Implementasi sila ketiga dapat diwujudkan dalam:

- Dialog lintas kelompok (akademisi, tokoh agama, aparat, mahasiswa, dan warga) untuk menemukan titik temu solusi bersama.
- Kampanye literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong yang dapat memecah belah.
- Peningkatan rasa bangga terhadap kebersamaan nasional melalui kegiatan kebudayaan dan sosial yang menyatukan warga pasca konflik.

Tantangannya adalah mengatasi ego sektoral, baik dari pemerintah maupun kelompok masyarakat. Konflik politik sering kali digunakan untuk memperkuat identitas kelompok tertentu, bukan untuk memperkuat solidaritas kebangsaan. Karena itu, sila ketiga harus diimplementasikan sebagai nilai aktif bukan sekadar slogan dalam setiap kebijakan publik dan gerakan sosial (F. Arifin et al., 2025).

Sila Ke 4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat menegaskan pentingnya proses musyawarah untuk mufakat sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat tanpa kekerasan. Nilai demokrasi Pancasila ini menempatkan kebijaksanaan dan kehendak rakyat sebagai dasar legitimasi kebijakan negara (Suharto, 2021). Dalam kasus demonstrasi Yogyakarta, ketidakhadiran ruang dialog menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya ketegangan antara aparat dan peserta aksi (Asnanda et al., 2022).

Banyak mahasiswa merasa tidak didengar oleh pejabat publik terkait isu yang mereka angkat misalnya kebijakan pembangunan atau keputusan politik nasional. Akibatnya, ruang aspirasi bergeser ke jalanan. Ketika aspirasi ditanggapi dengan pendekatan keamanan semata, proses musyawarah tidak berjalan, dan konflik menjadi tak terelakkan.

Implementasi sila keempat dalam konteks konflik dapat dilakukan melalui:

1. Dialog publik terbuka yang melibatkan perwakilan masyarakat, akademisi, pemerintah daerah, dan aparat keamanan.

2. Forum musyawarah daring yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan digital agar rakyat dapat menyampaikan kritik dengan aman dan terdata.
3. Pelatihan komunikasi non-kekerasan (non-violent communication) bagi petugas keamanan, mahasiswa, dan jurnalis agar opini berbeda dapat disampaikan dengan bahasa etis dan konstruktif.

Nilai kebijaksanaan dalam sila keempat menuntut kemampuan semua pihak untuk menahan ego dan berpikir jernih sebelum bertindak. Dalam hal ini musyawarah bukan sekadar mekanisme formal, tetapi proses etis yang melatih empati sosial dan tanggung jawab kolektif. Karena itu, penguatan budaya musyawarah di ruang publik menjadi bagian penting dari rekonsiliasi sosial pasca konflik (Saragih & Ndano, 2024).

Sila Ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima adalah puncak dari nilai-nilai Pancasila. Ia menegaskan bahwa keadilan baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik merupakan landasan untuk menjaga kedamaian sosial. Banyak konflik sosial politik berakar dari ketimpangan, diskriminasi, atau rasa ketidakadilan.

Dalam kasus ricuh demonstrasi Yogyakarta, sebagian mahasiswa menolak kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Riset Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi di daerah perkotaan seperti Yogyakarta masih cukup tinggi, dengan indeks Gini mencapai 0,43. Ketimpangan ini memperkuat rasa ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, yang kemudian memicu mobilisasi sosial.

Implementasi sila kelima dalam penyelesaian konflik meliputi:

- Keadilan dalam distribusi kebijakan: memastikan bahwa keputusan pemerintah tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
- Keadilan dalam hukum: penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, baik dari aparat maupun demonstran, dilakukan secara transparan tanpa diskriminasi.
- Keadilan sosial ekonomi: membuka ruang kerja dan kesejahteraan yang setara agar ketegangan struktural berkurang.

Tantangan terbesar dalam mewujudkan keadilan sosial adalah resistensi dari sistem birokrasi dan ekonomi yang masih timpang. Implementasi nilai keadilan tidak cukup melalui hukum, tetapi juga melalui perubahan mental dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat (Jamin, 2020).

Praktik Nyata dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan kajian akademik, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelesaian konflik sosial politik menghadapi beberapa kendala utama:

1. Kelemahan koordinasi antar lembaga negara dan masyarakat sipil.
2. Minimnya pendidikan nilai-nilai Pancasila di tingkat mahasiswa dan aparat.
3. Politisasi isu keagamaan dan kebangsaan.
4. Kurangnya ruang dialog yang konstruktif dan partisipatif.

Meski demikian, terdapat pula praktik baik seperti program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang berhasil mencegah eskalasi konflik sosial di beberapa daerah (BNPT, 2022). Pendekatan yang berakar pada nilai musyawarah dan empati terbukti lebih efektif daripada pendekatan keamanan yang represif.

Kesimpulan

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terbukti masih relevan dan aplikatif dalam menyelesaikan konflik sosial politik di Indonesia. Studi kasus ricuh demonstrasi di

Yogyakarta menunjukkan bahwa konflik yang berawal dari ketidakpuasan terhadap kebijakan publik dapat dikelola dengan baik apabila semua pihak berpegang pada nilai-nilai dasar Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengarahkan pada moralitas dan kemanusiaan dalam setiap tindakan. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan pentingnya pendekatan humanis dalam menyelesaikan konflik. Sila Persatuan Indonesia menjadi pondasi rekonsiliasi sosial, sementara sila Kerakyatan menegaskan pentingnya dialog dan partisipasi rakyat. Akhirnya, sila Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir dari seluruh proses penyelesaian konflik yang berkeadilan dan berkeadaban. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai Pancasila bukan hanya solusi ideologis, tetapi juga strategi praktis dalam mengelola dinamika sosial politik. Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan publik, pendidikan, dan perilaku sosial. Pancasila bukan sekadar simbol, tetapi panduan moral dan politik yang hidup, membimbing bangsa menuju tatanan masyarakat yang damai, adil, dan bermartabat.

Saran

Bagi Pemerintah dan Aparat Keamanan: Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam penanganan konflik sosial politik. Pendekatan yang digunakan hendaknya bersifat humanis, dialogis, dan berlandaskan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Diperlukan pula penguatan komunikasi publik dan mekanisme dialog antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat agar aspirasi dapat tersalurkan secara damai tanpa kekerasan. Bagi Lembaga Pendidikan dan Mahasiswa: Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan intelektual perlu memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, literasi politik, dan aktivitas kemahasiswaan. Mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan menyalurkan aspirasi secara santun dan konstruktif, serta menjadi teladan dalam menerapkan nilai kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah sebagai wujud nyata penerapan Pancasila dalam kehidupan sosial politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam-Troian, J., Çelebi, E., & Mahfud, Y. (2020). Police use of force during street protests: A pressing public mental health concern. *EClinicalMedicine*, 26, 100509. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100509>
- Agostini, M., & van Zomeren, M. (2021). Toward a Comprehensive and Potentially Cross-Cultural Model of Why People Engage in Collective Action: A Quantitative Research Synthesis of Four Motivations and Structural Constraints. In *Psychological Bulletin* (Vol. 147, Issue 7). <https://doi.org/10.1037/bul0000256>
- Akhmad, A., Asse, A., Nursalam, N., Ibrahim, I., Bunyamin, B., Anssar, A., & Sahajuddin, S. (2023). The Impact of the Increase of Oil Fuel Price and Government Subsidy on Indonesia's Economic Performance. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(6), 547–557. <https://doi.org/10.32479/ijeep.15033>
- Arifin, F., Pasundan, U., & Tedjabuwana, R. (2025). *Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan Indonesia ' s identity politics and populism : Disruption to national cohesion*. 22(1), 166–175.
- Arifin, M. (2023). Disharmoni Sosial Masyarakat Kampung Kota di Era Demokratisasi (Konflik dan Disharmoni Sosial di Yogyakarta Pada Pilpres tahun 2019). *Sasdaya: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 7(1), 58–76. <https://doi.org/10.22146/sasdaya.8621>
- Asnanda, D., Aka, K. A., & Damariswara, R. (2022). Research & Learning in Primary Education. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(1), 113–117. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/metafora/article/view/14085>
- Damanik, A. Z. (2024). *Pendekatan Muamalah dalam Mengatasi Tantangan Ekonomi Kontemporer*. 4.
- Firmansyah, A. A. (2022). Factual Reflection of Pancasila As the Basis of the State: Unifier and Defense of the Indonesian Nation. *Progressive Law Review*, 4(02), 79–83. <https://doi.org/10.36448/plr.v4i02.89>
- Fishman, R. M. (2025). Deepening or Endangering Democracy: Demonstrations and Institutions under Representative Government. *Perspectives on Politics*, 23(1), 93–102. <https://doi.org/10.1017/S1537592723002955>
- Informasi, M. (2022). *Jurnal Pertahanan (CASE STUDY OF STUDENT DEMONSTRATION BY BADAN*. 8(2), 253–264.
- Iswardhana, M. R., Kusumojakti, M. A. P., Pamungkas, A. S., Abdillah, I. D., Rayhan, M. N., Firmansyah, Y. S., & Baraputri, J. N. (2024). Menggali Perspektif Masyarakat Keberagaman Etnis Di Yogyakarta Dalam Upaya Memperkuat Integrasi Nasional. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 3(2), 62–68. <https://doi.org/10.56127/jammu.v3i2.1609>
- Jamin, M. (2020). Social Conflict Resolution Faculty of Law , Universitas Sebelas Maret. *Yustisia*, 9(1), 1–20.
- Maksudin. (2023). Analyses of moral values of student activists' protest demonstrations in Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta. *Cakrawala Pendidikan*, 42(1), 77–89. <https://doi.org/10.21831/cp.v42i1.51801>
- Maksum, A. (2016). Analisis Akselerasi Konflik Organisasi Keagamaan Islam Di Yogyakarta. *Research Report*, 347–356.
- Nursetialloh, E. (2017). Edukasia Islamika. *Edukasia Islamika*, 2(2), 172–190.
- Pescador Prieto. (2022). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.

- Saragih, J., & Ndano, Y. (2024). Sistem Demokrasi (Kebebasan Berpendapat) Masyarakat Di Indonesia Dalam Perspektif Sila Ke-4. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), 194–201.
- Shearer, T. M. (2021). Religion and social protest movements. In *Religion and Social Protest Movements*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315102542>
- Susilowat, M. ., Yoga, A., Apribilli, A., & K., A. (2023). Towards the Special Region of Yogyakarta with Pancasila Character Trough the Implementation of Regional Regulation No. 1 Year 2022 of DIY Province. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 06(06), 2475–2481. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i6-44>
- WIBOWO, T. W., SANTOSA, S. H. M. B., SUSILO, B., & PURWANTO, T. H. (2021). Revealing tourist hotspots in yogyakarta city based on social media data clustering. *Geojournal of Tourism and Geosites* , 34(1), 218–225. <https://doi.org/10.30892/gtg.34129-640>